

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2019



**Direktorat Bina
Usaha Perhutanan
Sosial dan Hutan
Adat**

Direktorat Jenderal PSKL

Kata Pengantar



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban seluruh pimpinan di jajaran Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat atas mandat negara dalam mengemban tugas Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat sesuai Renstra Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2015 – 2019.

Capaian berbagai target dan sasaran Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat tahun 2019 sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, dan semoga ke depan Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat terus mengalami peningkatan dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjang kelestarian Sumber Daya Hutan.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup khususnya Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2020

Direktur BUPSHA,



Herudojo Tjiptono, M.P.
NIP. 19610526 198903 1 001

Daftar Isi

	KATA PENGANTAR.....	1
	DAFTAR ISI.....	2
I	PENDAHULUAN.....	3
	A. Latar Belakang.....	3
	B. Tugas dan Fungsi.....	4
	C. Struktur Organisasi.....	4
II	PERENCANAAN KINERJA.....	6
	A. Gambaran Umum Rencana Kerja Pemerintah 2019.....	6
	B. Rencana Kerja 2019.....	6
III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
	B. Realisasi Anggaran.....	12
IV	PENUTUP.....	15
	LAMPIRAN	

Daftar Tabel

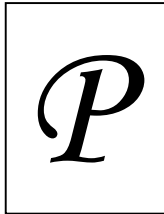
Tabel 1. Struktur organisasi Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	7
Tabel 2. Strategi pencapaian target Direktorat BUPSHA Tahun 2019	10
Tabel 3. Perbandingan capaian kinerja terhadap Renja Tahun 2019	11
Tabel 4. Capaian output Dit Bupsha dan BPSKL	12
Tabel 5. Jumlah KUPS Tahun 2019 berdasarkan klasifikasi blue, silver, gold dan platinum	12
Tabel 6. Capaian BUPSHA 2016-2019.....	13
Tabel 7. grafik capaian BUPSHA 2016-2019	13
Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. BUPSHA berdasarkan monev DJA	14
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. BUPSHA berdasarkan OM-SPAN	15
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran BUPSHA Pusat dan UPT/Balai PSKL.....	15
Tabel 11. Grafik Monitor anggaran Pusat dan UPT Tahun 2019.....	16

Daftar Lampiran

lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktur BUPSHA dengan Dirjen PSKL Tahun 2019	18
lampiran 2. Data Capaian Target Kinerja Dit. BUPSHA Tahun 2019.....	20
lampiran 3. Tabel Pengukuran Kinerja	21
lampiran 4. Tabel Laporan Isian E – Monev DJA	24

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



erhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

Demikian pula dalam penjelasan pasal 23 diamanatkan bahwa hutan sebagai sumberdaya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan sosial dilaksanakan melalui skema pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa HKm, HD, HTR, Kemitraan, Pengembangan Hutan Rakyat, dan pemberian akses pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir untuk meningkatkan modal dan akses pasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

Selain melalui skema tersebut diatas, perhutanan sosial juga diterapkan melalui pemberdayaan masyarakat adat dalam program Hutan Adat. Pelaksanaan program ini merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang yang dimulai dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang membatalkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Kemudian putusan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Skema perhutanan sosial tersebut tidaklah dapat menjamin tercapainya cita-cita pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan sumber daya hutan apabila hanya melalui pemberian ijin kepada masyarakat. Tantangan terbesar selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan setelah masyarakat mendapatkan ijin. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan kelompok menjadi solusi sebagai jembatan untuk menjamin tercapainya cita-cita pemberdayaan masyarakat.

Namun upaya tersebut tidaklah mudah, dengan segala keterbatasan yang ada maka Dit. BUPSHA dalam menjalankan tugasnya melakukan upaya terobosan berupa pelibatan para pihak terkait dalam setiap kegiatannya.

B. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT BUPSHA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 Tahun 2015, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

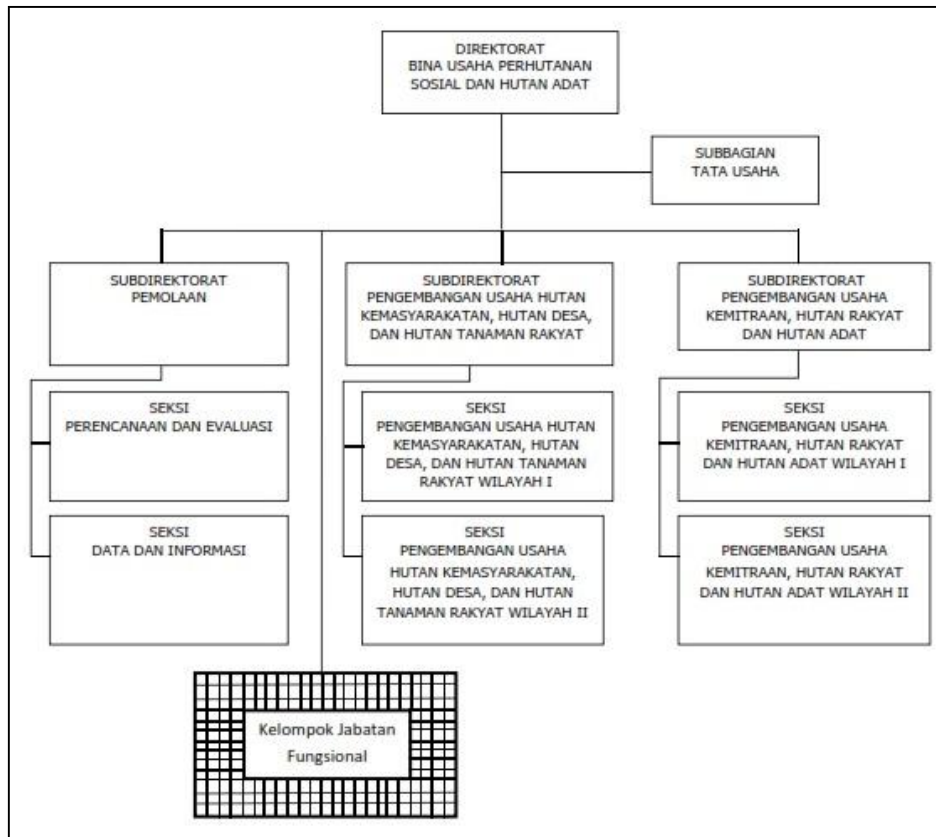
1. Perumusan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat terdiri atas 3 (tiga) Sub Direktorat dan satu Sub Bagian Tata Usaha yaitu :

1. Subdit Pemolaan;
2. Subdit Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat;

3. Subdit Pengembangan Usaha Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat; dan;
4. Sub Bagian Tata Usaha



Tabel 1. Struktur organisasi Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Laporan Kinerja (LKJ)

A. Gambaran Umum Rencana Kerja Pemerintah 2019

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).

Penyusunan RKP Tahun 2019 disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan : (1) menajamkan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dari 10 PN dan 30 PP pada RKP 2018 menjadi 5 PN dan 24 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP dan Kegiatan Prioritas (KP); serta (3) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui BUMN.

Dokumen RKP tahun 2019 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP dan KP dengan menjaga kesinambungan Hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota; pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan); penatakelolaan (kerangka kelembagaan); dan kemudahan berusaha (kerangka pelayanan umum dan investasi).

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2019 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (policy-driven), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau tugas dan fungsi organisasi.

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal PSKL ditujukan untuk memberikan landasan bagi keberhasilan pelaksanaan program pada tahun 2019 dan pencapaian sasaran program pada tahun 2019. Pada program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yaitu ditujukan untuk mewujudkan penyiapan modal sosial untuk peningkatan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, antara lain melalui penyiapan Peraturan Perundangan dan NSPK, jaringan civil society, kesiapan Pemda dan masyarakat.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal PSKL mengacu pada RKP 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI nomor 72 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2018 serta mengacu Rencana Kerja Kementerian LHK.

B. Rencana Kerja 2019

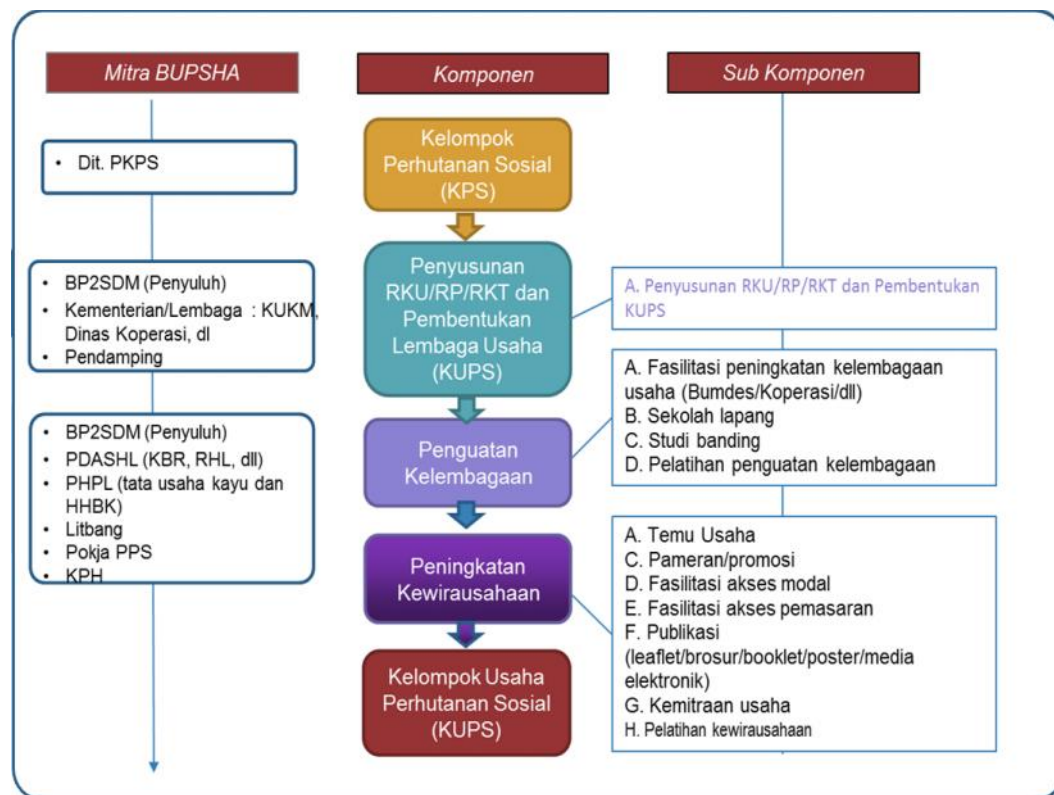
Target Dit. BUPSHA pada tahun 2019 adalah jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan sebanyak 1.500 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat, dan kemitraan).

Target jumlah kelompok usaha sebanyak 1.500 kelompok juga tertuang dalam perjanjian kinerja antara Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan (Lampiran 1). Perjanjian ini merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi terhadap hasil.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka Dit. BUPSHA dalam menjalankan tugasnya menerapkan beberapa strategi percepatan dan pencapaian target sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan (RP/RKU/RPHD dan RKT);
2. Penguatan kelembagaan (sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelembagaan, peningkatan status badan usaha kelompok, dll)
3. Peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan (bantuan alat ekonomi produktif, bang PeSoNa, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll)
4. Penguatan Kewirausahaan (temu usaha, pameran/promosi, akses modal, akses pembiayaan, akses pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan kewirausahaan, dll)



Tabel 2. Strategi pencapaian target Direktorat BUPSHA Tahun 2019

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum capaian kinerja Dit.BUPSHA terhadap Renja Tahun 2019 memuaskan. Dari target Renja Tahun 2019 berupa Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan sebesar 1.500 kelompok, realisasi kinerja Dit. BUPSHA mencapai 1.695 kelompok sebagaimana tersaji dalam Tabel 3 berikut sedangkan data terperinci capaian Dit.BUPSHA tahun 2019 tersaji pada Lampiran 2.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2019 (kelompok)	Capaian 2019 (kelompok)	Persentase (%) capaian 2019
	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan	1.500	1.695	113
	TOTAL	1.500	1.695	113

Tabel 3. Perbandingan capaian kinerja terhadap Renja Tahun 2019

Berbagai kegiatan dan fasilitasi pengembangan usaha dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk membentuk kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri. Pada Satker Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat sesuai dengan kewenangannya, kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa Penyusunan Perencanaan (RP/RKU/RPHD dan RKT), penguatan kelembagaan (sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelembagaan, peningkatan status badan usaha kelompok, dll), peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan (bantuan alat ekonomi produktif, bang PeSoNa, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll), dan penguatan kewirausahaan (temu usaha, pameran/promosi, akses modal, akses pembiayaan, akses pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan kewirausahaan, dll).

Sedangkan pada satker daerah /UPT, kegiatan langsung diarahkan dalam rangka memberikan fasilitasi penguatan kelembagaan dan penguatan kewirausahaan bagi kelompok usaha perhutanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

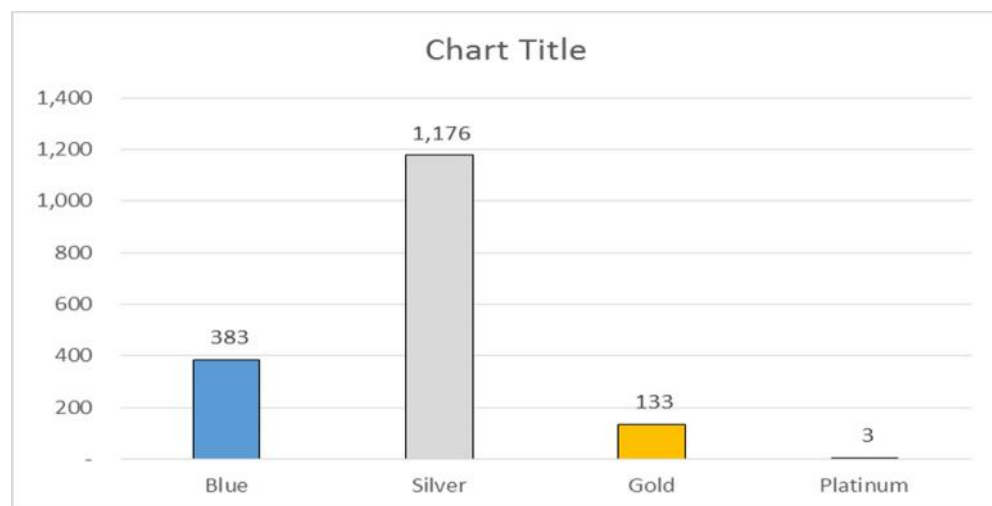
- 1) Sekolah lapang;
- 2) Studi banding;
- 3) Bantuan ekonomi produktif;
- 4) Pelatihan peningkatan produksi;
- 5) Akses pemasaran;
- 6) Akses modal;
- 7) Akses Pembiayaan;

No	Output	Target	Dit. BUPSHA	BPSKL Sumatera	BPSKL JBN	BPSKL Kalimantan	BPSKL Sulawesi	BPSKL Maluku Papua	Total Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah KUPS yang mandiri (Kelompok)	1,500	-	708	224	318	334	111	1,695	113%
2	Jumlah Fasilitas Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	2,300								
	a. Alat Ekonomi Produktif	600		190	100	100	123	103	616	103%
	b. Bang Pesona	1,700	467	252	415	143	335	88	1,700	100%

Tabel 4. Capaian output Dit Bupsha dan BPSKL

Setiap Kelompok usaha Perhutanan Sosial diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Blue : sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi
- 2) Silver : Sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit usaha
- 3) Gold : sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, Unit usaha, sudah melakukan pengolahan hasil/ sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman), sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal)
- 4) Platinum : Sudah ditetapkan sebagai KUPS, Potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, Unit usaha, Sudah melakukan pengolahan hasil/ sarana wisata, Sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/pinjaman, Sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal), Sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional)



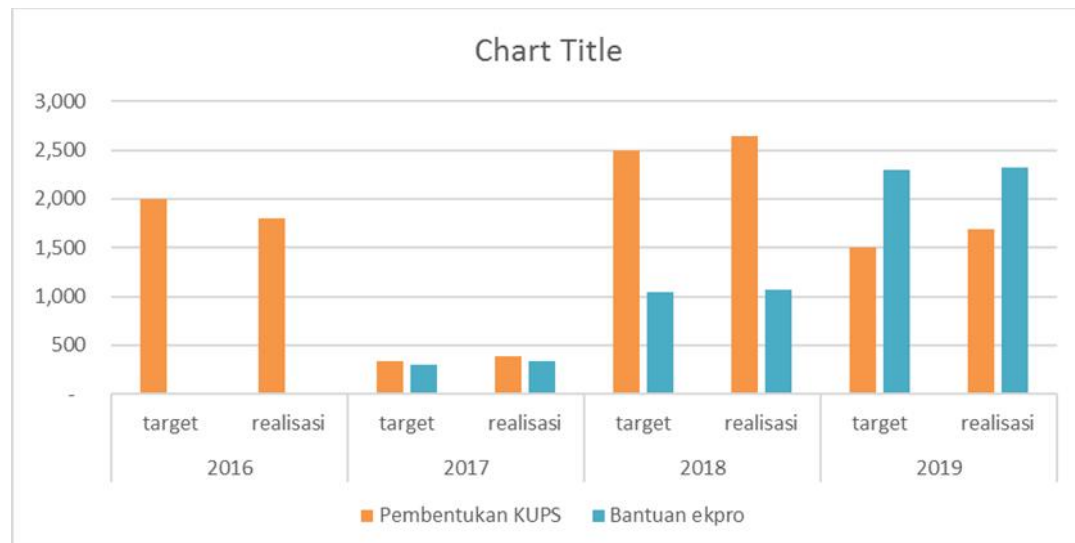
Tabel 5. Jumlah KUPS Tahun 2019 berdasarkan klasifikasi blue, silver, gold dan platinum

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 realisasi klasifikasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat sebagian besar adalah silver, yang berarti rata-rata KUPS yang terbentuk sudah menyusun RPHD/RKU/RPH/RKT dan masih KUPS yang belum memiliki akses modal dan pasar.

Target dan capaian Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2016-2019 sebagaimana table 6 berikut ini :

CAPAIAN BUPSHA 2016-2019								
Output	2016		2017		2018		2019	
	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
Pembentukan KUPS	2,000	1,797	340	383	2,500	2,647	1,500	1,695
Bantuan ekpro			300	343	1,050	1,075	2,300	2,316

Tabel 6. Capaian BUPSHA 2016-2019



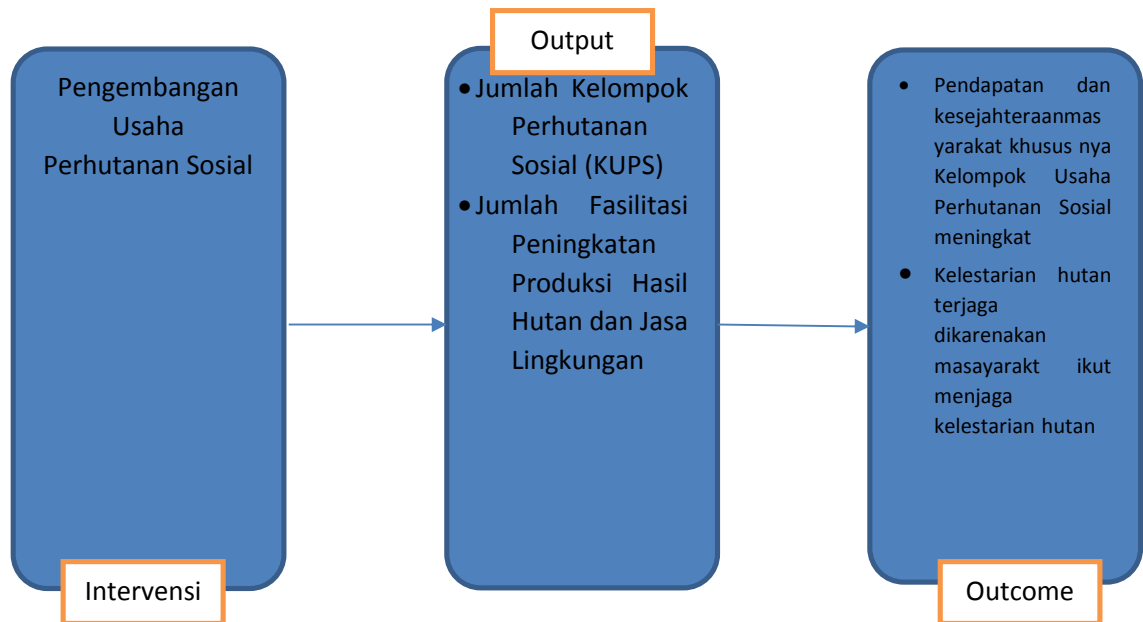
Tabel 7. grafik capaian BUPSHA 2016-2019

Dari table tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi output sejak tahun 2016-2019 hampir selalu melampaui target, kunci keberhasilan dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan kepada kelompok tani PS.
2. Identifikasi potensi dan pemanfaatan potensi secara optimal dilakukan melalui kegiatan antara lain agroforestry, maka kebutuhan pendapatan kelompok tani dalam jangka pendek, menengah dan panjang dapat terpenuhi.

3. Akses ke permodalan seperti KUR dan BLU.
4. Jaminan pasar atau adanya offtaker yang siap membeli produk yang dihasilkan dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Analisis capaian kinerja tidak hanya pada tingkatan output, melainkan juga menyajikan hasil kinerja pada tingkatan hasil (outcome) dari masing-masing unit kerja. Berikut ini transformasi evaluasi kinerja untuk pengembangan usaha Perhutanan Sosial :



B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tupoksi Dit. BUPSHA, dukungan alokasi anggaran yang ada tergambar dalam tabel berikut:

Nama Output	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)			
5413.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,300,000,000	-	1,276,670,000	-	1,300,000,000	1,276,670,000	98.21%
5415.001 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Kelompok)	43,732,267,000	137,900,000	42,281,016,211	114,843,831	43,870,167,000	42,395,860,042	96.64%
5415.002 Jumlah fasilitas peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan (Paket)	93,500,000,000	-	93,476,184,400	-	93,500,000,000	93,476,184,400	99.97%
5415.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	-	734,000,000	-	695,776,620	734,000,000	695,776,620	94.79%
	138,532,267,000	871,900,000	137,033,870,611	810,620,451	139,404,167,000	137,844,491,062	98.88%

*) Sumber money DJA

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. BUPSHA berdasarkan money DJA

No	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja			Total
				Pegawai	Barang	Modal	
1	DIREKTORAT USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT	140	PAGU	-	11,779,150,000	-	11,779,150,000
			REALISASI	-	11,760,854,503	-	11,760,854,503
			PERSENTASE	0.00%	(99.84%)	0.00%	(99.84%)
			SISA	-	18,295,497	-	18,295,497
2	DIREKTORAT USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT	182	PAGU	-	126,753,117,000	871,900,000	127,625,017,000
			REALISASI	-	125,273,016,108	810,620,451	126,083,636,559
			PERSENTASE	0.00%	(98.83%)	(92.97%)	(98.79%)
			SISA	-	1,480,100,892	61,279,549	1,541,380,441

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. BUPSHA berdasarkan OM-SPAN

Direktorat BUPSHA mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp.137.844.491.062 atau sebesar 98.88% dari total pagu revisi terakhir sebesar Rp.139.404.167.000,-

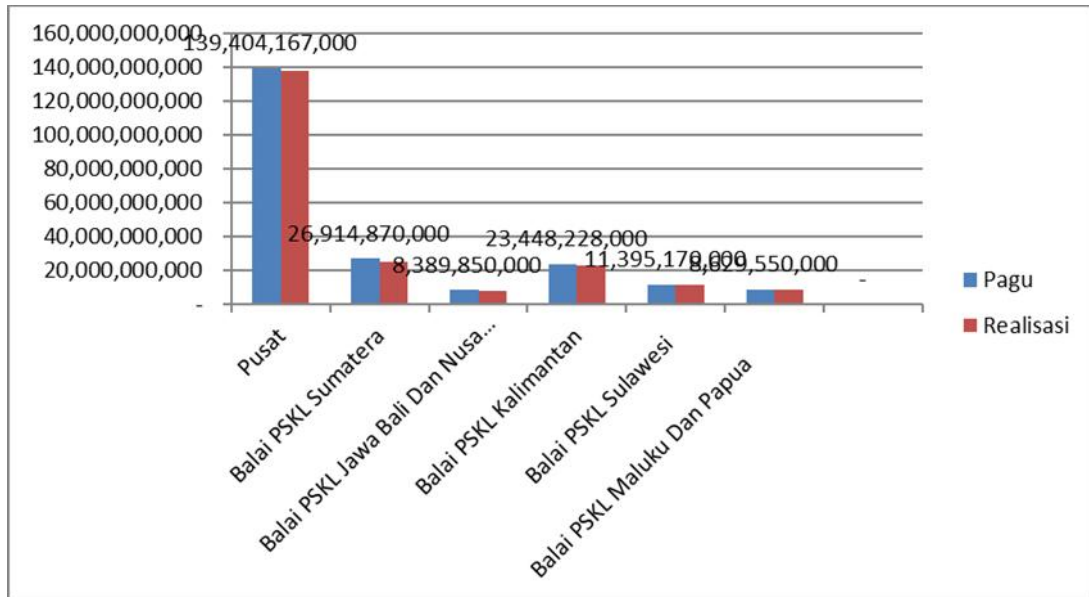
Apabila dinilai dari kinerja serapan anggaran Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) secara keseluruhan yaitu meliputi anggaran pusat dan Balai PSKL/UPT maka capaian kinerja serapan anggaran juga menunjukkan performa yang cukup baik.

Secara total pagu dan realisasi anggaran Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) tersaji pada Tabel 10 berikut:

No	Satket	Pagu	Realisasi
1	Pusat	139,404,167,000	137,844,491,062
2	Balai PSKL Sumatera	26,914,870,000	25,156,488,919
3	Balai PSKL Jawa Bali Dan Nusa Tenggara	8,389,850,000	8,012,310,031
4	Balai PSKL Kalimantan	23,448,228,000	22,704,236,363
5	Balai PSKL Sulawesi	11,395,170,000	11,275,133,386
6	Balai PSKL Maluku Dan Papua	8,629,550,000	8,513,363,199
	Total	218,181,835,000	213,506,022,960

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran BUPSHA Pusat dan UPT/Balai PSKL

Berdasarkan data serapan tersebut, kinerja program Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) di tingkat tapak yang dilakukan oleh UPT yaitu Balai PSKL cukup baik. Nilai serapan kinerja anggaran mencapai 97,86 % dengan grafik perbandingan sebagai berikut:



Tabel 11. Grafik Monitor anggaran Pusat dan UPT Tahun 2019

Untuk Satker pusat, sebagian besar anggaran yang ada dialokasikan untuk koordinasi para pihak, promosi/penyebarnya program pengembangan usaha, penyusunan NSPK, dan penyusunan data base kelompok usaha. Sedangkan untuk satker daerah /UPT, kegiatan langsung diarahkan dalam rangka memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan bagi kelompok usaha perhutanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Penyusunan dokumen rencana pengembangan usaha;
- Fasilitasi peningkatan kelembagaan;
- Pelatihan budidaya dan pengolahan;
- Temu usaha; dan
- Pemberian bantuan sarana dan prasarana

IV. PENUTUP

Melihat dari realisasi anggaran dengan target/pagu anggaran tahun 2019, penyerapan pada BUPSHA pusat maupun UPT termasuk baik. Terutama penyerapan anggaran pada Dit. BUPSHA pusat yang mencapai 98.88 % dari. Jika melihat perbandingan dari realisasi capaian kinerja dengan target tahun 2019, Dit BUPSHA sudah bekerja dengan baik yaitu mencapai 1.695 kelompok dari target 1.500 kelompok atau mencapai 113 %.

Untuk mengejar ketertinggalan kinerja kedepan, maka akan dilakukan upaya-upaya akselerasi pencapaian target seperti mendorong pelibatan aktif para pihak baik institusi/kementerian lain, Pemerintah daerah, NGO, Swasta, Lembaga Penelitian, dan kelompok masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, serta penyusunan kebijakan yang mendukung kegiatan pengembangan usaha. Harapannya dengan dilakukan upaya tersebut segala kendala dan kekurangan yang ada dalam upaya pengembangan usaha dapat teratasi sehingga target kinerja Dit.BUPSHA sesuai renstra Dit. BUPSHA dapat tercapai dengan baik.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. B. Herudojo Tjiptono, M.P.
Jabatan : Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
Jabatan : Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan

Pihak Pertama,
Direktur Bina Usaha Perhutanan
Sosial dan Hutan Adat,


Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
NIP. 19631004 199004 1 001


Ir. B. Herudojo Tjiptono, M.P.
NIP. 19610526 198903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DAN HUTAN ADAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	1.500 Kelompok
2	Terfasilitasinya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dalam peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	2.300 Paket

Kegiatan

Anggaran

Penyiapan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat


Rp 139.404.167.000,-

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat,


Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
NIP. 19631004 199004 1 001


Ir. B. Herudjo Tjiptono, M.P.
NIP. 19610526 198903 1 001

REKAPITULASI CAPAIAN IKK BUPSHA PERPROVINSI TAHUN 2019												
No.	Provinsi	Pembentukan KUPS		Bantuan Sarpras (AEP)		Bang PeSoNa		RKU/RPH/RPHD	Kategori			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Realisasi	Blue	Silver	Gold	Platinum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMATERA												
1	Aceh		26		-	16	16	3	26	-	-	-
2	Jambi		56		14	11	11	20	8	48	-	-
3	Kepulauan Riau		52		5	-	-	15	8	44	-	-
4	Lampung		183		12	81	81	71	9	169	5	-
5	Riau		95		6	15	15	26	20	75	-	-
6	Bengkulu		15		25	18	18	-	15	-	-	-
7	Kep. Bangka Belitung		33		12	38	38	-	33	-	-	-
8	Sumatera Barat		93		23	60	60	34	48	45	-	-
9	Sumatera Selatan		68		49	50	50	7	63	5	-	-
10	Sumatera Utara		87		44	44	44	17	45	42	-	-
JUMLAH		640	708	190	190	333	333	193	275	428	5	-
JAWA BALI NUSRA												
1	Banten	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-
2	Jawa Barat	25	33	20	23	356	356	17	-	4	28	1
3	Jawa Tengah	15	23	20	24	140	140	18	4	18	-	1
4	Jawa Timur	55	76	11	11	179	179	28	17	37	22	-
5	Bali	80	83	27	30	31	31	21	28	42	12	1
6	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	-
7	Nusa Tenggara Timur	7	9	1	1	20	20	-	1	6	2	-
8	DI Yogyakarta	-	-	11	11	9	9	-	-	-	-	-
JUMLAH		182	224	90	100	801	801	84	50	107	64	3
KALIMANTAN												
1	Kalimantan Selatan	58	83	20	26	34	34	20	5	55	23	-
2	Kalimantan Tengah	59	119	20	24	5	5	39	-	103	16	-
3	Kalimantan Timur	58	19	20	3	44	44	-	14	5	-	-
4	Kalimantan Barat	59	35	20	35	56	56	-	20	15	-	-
5	Kalimantan Utara	58	62	20	12	4	4	21	-	43	19	-
JUMLAH		292	318	100	100	143	143	80	39	221	58	-
SULAWESI												
1	Sulawesi Selatan		127		72	224	224	42	-	127	-	-
2	Sulawesi Tengah		-		17	-	-	-	-	-	-	-
3	Sulawesi Tenggara		12		8	29	29	-	-	12	-	-
4	Sulawesi Utara		30		5	13	13	8	-	30	-	-
5	Sulawesi Barat		90		3	35	35	19	-	89	1	-
6	Gorontalo		75		18	34	34	28	-	75	-	-
JUMLAH		306	334	120	123	335	335	97	-	333	1	-
MALUKU												
1.	Maluku	20	55	25	37	8	8	28	13	40	2	-
2.	Maluku Utara	20	45	25	24	24	24	6	6	36	3	-
3.	Papua	20	1	25	1	13	13	-	-	1	-	-
4.	Papua Barat	20	10	25	41	43	43	-	-	10	-	-
JUMLAH		80	111	100	103	88	88	34	19	87	5	-
TOTAL		1,500	1,695	600	616	1,700	1,700	488	383	1,176	133	3
Keterangan :		Anggaran Direktorat BUPSHA										

Lampiran 2. Data Capaian Target Kinerja Dit. BUPSHA Tahun 2019

RENCANA STRATEGIK
TAHUN : 2015 - 2019

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	STRATEGI	KEGIATAN
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peraturan/pedoman pengembangan usaha; 2. Penyebarluasan Informasi terkait program dan kebijakan Direktorat; 3. Koordinasi multipihak terkait pengembangan usaha; 4. Penyusunan data base; 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan dalam bentuk pelatihan, workshop, dan study banding; 6. Pengendalian program pengembangan usaha (bintek, monev, dan pembinaan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan NSPK 2. Koordinasi multipihak 3. Updating database PUPS 4. Penguatan kapasitas petugas dan pendamping 5. Penyusunan dan penyebarluasan informasi 6. Pembinaan, Bintek dan Monev 7. Identifikasi potensi dan KUPS 8. Pembuatan publikasi kegiatan PUPSPS 9. Pembuatan Rencana Kerja/PUPSPS 10. Pelatihan Penguatan Kelembagaan 11. Pelatihan Budidaya Tanaman 12. Pelatihan Pengembangan Usaha (pelatihan dan bantuan sarpras) 13. Pembibitan Perhutanan sosial 14. Tenaga Pendamping PS 15. Bintek dan Monev

lampiran 3. Tabel Pengukuran Kinerja

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN : 2019

INSTANSI : Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Program PSKL
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Berkelanjutan	Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha Perhutanan sosial	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sebanyak 1.500 Kelompok	BUPSHA
			Peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan perhutanan sosial	Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan sebanyak 2.300 paket	BUPSHA

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN : 2019

INSTANSI DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT

PROGRAM	KEGIATAN					PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	Kelompok	1.500 kelompok	1.695 kelompok	113 %

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN : 2019

INSTANSI : Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	1.500 Kelompok	1.695 kelompok	113 %

lampiran 4. Tabel Laporan Isian E – Monev DJA

Nama Output	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (
	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)			
5413.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,300,000,000	-	1,276,670,000	-	1,300,000,000	1,276,670,000	98.21%
5415.001 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Kelompok)	43,732,267,000	137,900,000	42,281,016,211	114,843,831	43,870,167,000	42,395,860,042	96.64%
5415.002 Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan (Paket)	93,500,000,000	-	93,476,184,400	-	93,500,000,000	93,476,184,400	99.97%
5415.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	-	734,000,000	-	695,776,620	734,000,000	695,776,620	94.79%
	138,532,267,000	871,900,000	137,033,870,611	810,620,451	139,404,167,000	137,844,491,062	98.88%